

BAB IV

PEMBAHASAN

Sistem multipartai di Indonesia timbul karena banyaknya golongan-golongan di masyarakat yang membuat masyarakat membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen (Labolo & Ilham, 2015). Golongan-golongan tersebut aktif menyuarakan hak politiknya sesuai dengan target tujuan golongannya, termasuk mengenai isu-isu keperempuan. Namun, jarang sekali isu keperempuan disuarakan kecuali sesama perempuan. Maka penting kaum perempuan merambah politik baik menjadi kepala daerah, anggota parlemen bahkan hingga posisi presiden sekalipun.

Budaya politik partai politik Indonesia yang masih condong sentralis dan patriarkis membuat calon legislatif perempuan tidak berkesempatan mendapatkan di nomor jadi dan dinominasikan hanya sebagai formalitas tanpa kematangan mekanisme pendidikan dan rekrutmen politik yang memadai demi memenuhi kuota 30 persen yang diamankan oleh undang-undang (Putra, 2012, p. 102). Sehingga jumlah calon legislatif perempuan yang berhasil melenggang maju di parlemen dalam tiap level kota/kabupaten, provinsi bahkan di Senayan pun masih terbilang jauh dari calon legislatif laki-laki yang berhasil memenangkan kontestasi pilihan legislatif (pileg) di masyarakat.

Sementara itu konstituen juga memerlukan hubungan jangka panjang, mengingat besarnya investasi emosional dan psikologis yang sudah mereka kucurkan di suatu partai politik atau kontestan individu (Firmanzah, 2012). Seperti halnya pemasaran sebuah produk, perusahaan harus membranding produk tersebut agar dilirik oleh konsumen hingga produk itu akan selalu dibeli continue di pasaran. Begitu pun dalam politik, agar mendapatkan “tempat” dibenak konstituen maka perlu adanya strategi khusus, dimana strategi politik ini bukan hanya membuat *electorate* memilih partai atau kandidat tertentu melainkan untuk membangun loyalitas konstituen secara berkelanjutan (Wahid, 2018).

Selain itu membangun hubungan baik jangka panjang antara para politikus dalam satu partai ataupun partai lain juga penting, selain itu membangun konsensus dengan konstituen dirasa lebih penting oleh para politisi perempuan petahana di Jawa Tengah. Konsensus dibangun atas kesepakatan bersama dinatara kedua belah pihak, adanya konsensus agar semua pihak memiliki *sense of belonging* sehingga mereka semua dapat berpartisipasi aktif dalam merealisasikan tujuan bersama.

Memenangkan pertarungan sengit antar lawan politik di Jawa Tengah tentu tidak mudah, apalagi Jawa tengah terkenal dengan sebutan lumbung banteng. Politisi yang tidak berasal dari partai banteng harus berusaha keras mendapatkan suara di setiap kontestasi pemilihan. Politisi perempuan petahana untuk mempertahankan dirinya di

kursi parlemen menerapkan membangun konsensus sesuai caranya masing-masing yang memang bisa mereka lakukan.

4.1.Pra Terpilih Anggota Dewan

4.1.1 Memilah dan Memilih Partai Pengusung

Citra partai dimata publik adalah sesuatu yang dipercaya dan diharapkan oleh masyarakat yang akan dilakukan oleh partai tersebut dalam merealisasikan keinginan masyarakat tanpa melanggar peraturan di Indonesia. Citra partai politik berjalan berkesinambungan dengan pola laku anggota partai politiknya. Tatkala anggota partai politik melakukan tindakan-tindakan positif di masyarakat maka elektabilitas partai juga akan ikut meningkat. Pamor partai politik akan meredup jika kebanyakan anggota partainya bersikap negatif di masyarakat seperti anggotanya banyak melakukan korupsi, banyak terjerat kasus narkoba dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini politisi perempuan menggunakan partai politik masing-masing sebagai kendaraanya melaju di parlemen Provinsi Jawa Tengah tidak berganti-ganti. Bergabungnya politisi perempuan berdasarkan kesamaan ideologi yang memang sudah mengakar dari keluarga besarnya maupun kecocokan visi misi antara dirinya sendiri dengan tujuan dari partai politiknya. Bukti politisi perempuan sudah yakin dan memantapkan kelembagaannya tidak sebatas bergantung pada partai politik saja.

Lewat wawancara mengenai *track record* politisi perempuan dalam bab III ditemukan beberapa politisi perempuan sebelum akhirnya berkiprah ditataran politik praktis sudah mendayung pada organisasi-organisasi non partai. Organisasi non partai terdiri dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan organisasi keagamaan. Para politisi perempuan tersebut mampu mempertahankan dirinya karena menerapkan strategi memantapkan kelembagaan baik partai politik maupun non partai politik. Selain berhasil mempertahankan kelayaitasan konstituennya karena tidak goyah akan kelembagaan, politisi perempuan mampu mendapatkan suara tambahan dari anggota-anggota yang baru memasuki organisasi kelembagaan tersebut.

4.1.2 Penyusunan Peta Politik

Memahami khalayak politik atau calon pemberi suara dalam komunikasi politik menjadi sangat penting dan hal itu masuk dalam startegi komunikasi politik. Politisi perempuan petahana harus mampu menemukan formula khusus dalam menjaga pasukan konstituennya. Politisi perempuan bisa membuat para pendukungnya loyal bukan semata-mata hanya memberikan program-program pemerintah secara cuma-cuma. Politisi perempuan petahan ternyata berusaha memahami apa keinginan konstituen di masing-masing dapil, kemudian mencoba menyampaikan aspirasinya ketika rapat di parlemen.

Agar konstituennya bisa memperoleh apa yang mereka butuhkan dan nama politisi perempuan tetap baik tidak dianggap berbohong, maka politisi perempuan harus pandai memainkan strategi khusus agar keduanya bisa berjalan lancar. Politisi perempuan petahana di Jawa Tengah lebih sering melakukan kunjungan dapil non-formal karena dengan metode begitu mampu membuat dirinya dan konstituen semakin dekat. Kunjungan dapil non-formal yang dilakukan oleh para politisi perempuan petahana sekaligus mengetahui problematika-problematika apa saja yang sedang dihadapi oleh konstituennya.

Berdasarkan penelitian ke-15 politisi perempuan petahana di DPRD Provinsi Jawa Tengah, mereka menerapkan strategi tertentu dalam memahami konstituennya di setiap dapil. Strategi tersebut yang membuat mereka berhasil memenangkan kembali di setiap pilihan legislatif.

4.1.2.1 Main Target

Perlu adanya klasifikasi pemilih didasarkan pada kelompok usia, profesi, jenis kelamin yang menjadi sasaran kandidat dalam merealisasikan program kerja pemerintah (Wahid, 2018). *Main target* adalah sebuah usaha menentukan dengan pasti siapa yang akan menjadi sasaran program yang dibuat (Indrawan, 2018). Konstituen sangat banyak dan politisi perempuan petahan harus pandai membagi-bagi program kerjanya sesuai dengan target dan tetap merangkul agar masyarakat bisa menjadi lebih berdaya.

Sebesar apapun partai politik dan nama baik politisi perempuan tidak akan mungkin memenuhi permintaan seluruh anggota masyarakat. Politis perempuan petahana memprioritaskan pendukungnya terlebih dahulu tapi juga dipastikan dulu sasarannya, agar program kerjanya bisa tetap sasaran dan tentu saja tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pola main target memang diterapkan oleh seluruh politisi perempuan petahana di DPRD, mereka menentukan main target disesuaikan dengan program kerja komisinya.

Bila main target sudah sesuai maka politisi perempuan dan konstitun sama-sama untung, konstituen bisa mendapatkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan politisi perempuan juga mendapatkan penilaian positif di mata masyarakat. Membentuk loyalitas memang tidak sekadar memberikan bantuan-bantuan secara formalitas pada masyarakat. Apabila politisi perempuan hanya memberikan bantuan bersifat formalitas tidak mengandalkan main target akan menimbulkan polemik baru.

Bukan loyalitas konstituen yang terpupuk tetapi citra negatif akan tumbuh di mata para konstituen. Contohnya, program pelatihan membuat produk makanan UMKM tidak mungkin diberikan kepada masyarakat usia manula. Program tersebut harusnya diberikan pada perempuan usia-usia produktif yang ingin mengembangkan UMKM bidang kuliner. Politisi perempuan ketika merealisasikan program kerja sesuai komisinya tidak sembarangan, mereka menggunakan main target terlebih dahulu di basis massanya.

Apabila basis massa sudah terpenuhi atau sudah pernah menerima program darinya, politisi perempuan akan memberikan program lainnya kepada masyarakat lainnya. Begitu pola strategi komunikasi politik politisi petahana yang memenangkan percaturan politik di Jawa Tengah lebih dari satu kali berturut-turut. Target sasaran setiap program kerjanya selalu jelas sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan diayomi.

4.1.2.2 Clustering Target

Maksud dari *clustering target* adalah memilih suatu wilayah di daerah pemilihan politisi perempuan dimana wilayah tersebut nantinya mempunyai efek domino ke wilayah lainnya. Politisi perempuan memang tidak bisa memberikan program di tiap wilayah, tetapi politisi perempuan bisa menjalankan satu program yang bisa langsung dinikmati oleh banyak wilayah di dapilnya.

Pentingnya *clustering target* agar bisa mengoptimalkan dan pemerintah sebaik mungkin sehingga tidak ada konstituen yang merasa tidak tersentuh atas program kerja pemerintah atau merasa aspirasinya tidak didengarkan oleh politisi perempuan. Politisi perempuan sering melaksanakan kunjungan dapil non formal agar bisa melakukan *clustering target* di dapilnya.

Dengan mengandalkan *clustering target* politisi perempuan petahana akhirnya bisa memetakan program kerjanya, merealisasikan aspirasi dari konstituennya dan

memahami keseluruhan aoa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapilnya. Selain meminimalisir pengeluaran agar bisa dimanfaatkan dalam merealisasikan program kerja di wilayah lainnya, clustering target ini mampu memperkuat silaturahmi antara politisi perempuan petahan dengan khalayak umum.

4.1.2.3 Hot Button

Sekalipun di daerah pemilihan mempunyai problematika yang sama tapi tiap wilayah di dapil pasti memiliki latar belakang berbeda satu sama lain sehingga titik singgung permasalahannya pun berbeda itulah maksud dari *hot button*. *Hot button* ada yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek (Indrawan, 2018). *Hot button* yang dilakukan oleh politisi perempuan petahana di Provinsi Jawa Tengah tidak bersifat jangka pendek, tetapi mereka lebih condong menerapkan jangka panjang.

Menurut pandangan politisi perempuan di Jawa Tengah dengan menerapkan *hot button* jangka panjang akan memunculkan keterkaitan emosional yang kuat antara dirinya dengan konstituen. Hot button ini harus dipahami betul oleh para politisi, latar belakang wilayah di tiap dapil mulai dari sejarah hingga tokoh-tokoh masyarakat pun harus diingat kuat oleh politisi perempuan.

Ketika politisi perempuan sudah berhasil menemukan hot button maka politisi perempuan akan lebih mudah untuk segera melaksanakan program kerja di wilayahnya masing-masing. Hot button unsur utama politisi perempuan bisa merealisasikan

program kerja komisinya dan aspirasi konstituennya. Apabila hot buttonnya sudah tepat dan pas maka akan mempermudah pelaksanaan program kerja. Politisi perempuan tidak mau ceroboh mendatangi dapilnya tanpa mengetahui sejarah wilayah tersebut dan para tokoh yang disegani oleh masyarakat setempat. Menerapkan sistem “kulanuwon” prinsip para politisi perempuan agar tidak dipandang masyarakat tak memiliki etika.

4.1.2.4 Program

Perlu dipahami antara program dan hot button memang memiliki kedekatan kuat antara keduanya. Seperti telah diterangkan sebelumnya, lewat hot button yang sudah digali dan ditemukan politisi perempuan, disusunlah program-program khusus agar mampu menyentuh hot button tersebut. Program jangka panjang memiliki keunggulan karena sentuhan yang berulang kali dari politisi perempuan petahana ke konstituennya secara kasat mata akan menciptakan keterikatan emosional antara politisi dengan konstituennya (Indrawan, 2018).

Seperti contoh di sebuah wilayah yang masih satu dapil ada kelompok masyarakat yang masih memperingati sedekah bumi, salah satu politisi perempuan tetap merealisasikan programnya di bidang sosial dengan membantu pemberian sembako dan mengisi “diskusi” dengan masyarakat perihal pentingnya melestarikan kebudayaan tanpa merusak lingkungan. Setelah itu politisi perempuan memberikan bibit pertanian, perkebunan beserta pupuknya agar masyarakat di wilayah tersebut bisa berdaya secara ekonomi dengan usaha pertanian dan perkebunannya.

Program itu tidak sebatas dalam satu waktu, politisi perempuan dua bulan kemudian akan menilik kembali hasil dari bibit-bibit yang sudah dihibahkan, agar politisi perempuan mengetahui masyarakat wilayah tersebut benar-benar merealisasikan penanaman atau tidak. Ketika masyarakat panen, politisi perempuan akan membantu menyalurkan produk mereka melalui produsen-produsen kenalnya agar hasil panen tersebut bisa dikemas dan dijual di wilayah perkotaan. Taktik kunjungan dapil secara non-formal agar mengetahui seluk beluk wilayah tertentu diterapkan oleh beberapa narasumber di dalam penelitian ini.

4.1.2.5 State Of Mind

Maksud dari state of mind di sini ditunjukkan dengan membuat program yang bisa memikat para konstituen tetap atau masyarakat secara luas di masing-masing dapil politisi perempuan. Tiap politisi perempuan petahana di DPRD Provinsi Jawa Tengah terkadang untuk memikat masyarakat tidak harus menggunakan program kerja yang sudah dibuat oleh lembaga. Namun mereka inisiatif mengadakan kegiatan sendiri di luar acara kantor dan menggunakan biaya pribadi.

Contohnya ketika politisi perempuan mengundang pelatih senam di wilayahnya khusus para ibu-ibu, masyarakat di sana khususnya para ibu merasa diperhatikan karena bila memanggil guru senam secara pribadi masyarakat harus membayar. Senam itu dilakukan setiap minggu pagi sehingga para ibu dari berbagai kalangan bisa

mengikutinya dan kesehatan mereka bisa terjaga dengan mengikuti senam gratis tiap minggu.

Kegiatan-kegiatan non formal justru dapat membuat ikatan tersendiri diantara politisi dan konstituennya. Mungkin kegiatannya dirasa sepele oleh sebagian politisi lainnya tetapi justru konstituen merasa diperhatikan oleh anggota dewannya dan mereka secara cuma-cuma atau tidak berat hati akan tetap memilih politisi tersebut.

4.2. Masa Kampanye

4.2.1 Menentukan Alat Kampanye

Di era kontemporer pemanfaatan ruang-ruang media tombak utama tokoh-tokoh politik untuk sekadar memberikan informasi atau membranding namanya kepada publik. Media cukup penting untuk memperkenalkan seseorang pada khalayak luas. Klapper dalam buku Firmanzah (2012) menyebutkan media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat. Termasuk di lingkaran politik, peran media dibutuhkan oleh politisi agar masyarakat bisa mengenal diri mereka dan bisa memilih mereka ketika kontestasi pemilihan baik itu pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pilihan legislatif (pileg).

Apabila dulu media cetak menjadi favorit di masyarakat selain televisi hitam putih dan radio maka di era kontemporer kemunculan internet menjadi harapan tersendiri bagi para politisi. Selain biayanya tidak terlalu mahal, adanya internet juga

dimanfaatkan oleh masyarakat dengan variasi tawaran media sosial mulai dari twitter, instagram, facebook ataupun tiktok. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi di masyarakat bisa dimanfaatkan positif oleh para politisi perempuan petahana DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Namun penggunaan media di kalangan politisi perempuan petahana tidak semua direalisasikan secara maksimal. Temuan itu didapatkan oleh peneliti dari jawaban-jawaban hasil wawancara, meski tidak semua politisi perempuan petahana menggunakan media secara maksimal mereka tetap berhasil memenangkan hatinya di hadapan para konstituen, buktinya mereka bisa terpilih lebih dari satu periode berturut-turut.

4.2.1.1 Penggunaan Media Cetak dan Media Online

Ada banyak media yang dapat dipilih untuk digunakan para politisi dalam melancarkan pengenalan pribadi maupun visi misinya ketika pileg kepada masyarakat luas. Media massa semisal radio, televisi, surat kabar, majalah, tabloid maupun media nir-massa seperti poster maupun pamflet (Riswandi, 2009). Pemilihan media harus disesuaikan dengan target sasaran yang akan dituju oleh politisi perempuan petahana.

Penggunaan media secara intens justru hanya digunakan oleh politisi perempuan petahana ketika awal berkecimpung di ranah politik. Mereka menggunakan koran lokal, radio lokal menyebarkan poster dan pamflet pada masyarakat. Perkenalan

awal intens dengan media ditekankan agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu profil dan visi misi singkat dari para politisi perempuan.

Setelah memenangkan pileg, politisi perempuan tetap menjaga hubungan baik dengan awak media. Terkadang mereka mengundang wartawan bukan untuk diliput tapi sebatas makan bersama dan saling tukar informasi, menjaga silaturahmi dengan awak media dirasa perlu oleh beberapa politisi perempuan petahana di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Munculnya awak media online juga ada yang diajak kerjasama oleh politisi perempuan petahana apabila mereka melakukan reses meski sudah ada website dari lembaga tetapi demi menjaga komunikasi yang baik beberapa politisi perempuan masih menggunakan jasa pemberitaan online.

Untuk politisi perempuan yang tidak terlalu melibatkan banyak media karena ada beberapa faktor. Faktor pertama; melihat segmentasi konstituennya. Konstituen di daerah desa jarang membaca koran meskipun koran lokal, sehingga politisi perempuan petahana ada yang lebih sering mengunjungi dapilnya dibanding memberikan informasi aktivitasnya sebagai anggota dewan melalui media massa. Faktor kedua; dengan mengundang awak media juga membutuhkan pendanaan. Politisi perempuan petahana merasa pengeluaran biaya untuk media bisa disalurkan untuk kegiatan lain di masyarakat misal membantu uang kas karang taruna atau memberi doorpriza di masyarakat ketika kegiatan 17 agustusan.

4.2.1.2 Pemanfaatan Media Sosial Pribadi Sebagai Alat Komunikasi Politik

Dalam wawancara penelitian ada politisi perempuan petahana yang mungkin memang penggunaan pemberitaan di media cetak maupun media online tidak masif tetapi mereka beralih memakai akun media sosialnya sebagai corong komunikasi politik antara dirinya dengan konstituen. Pemanfaatan akun media sosial pribadi memfasilitasi dan memudahkan konstituen dalam melakukan pelaporan permasalahan di masyarakat dengan memperluas kemampuan dan pilihan pelaporan secara elektronik (Julius & Limakrisna, 2016).

Di akun media sosialnya yakni facebook beberapa politisi perempuan petahan membagikan aktivitasnya sebagai anggota dewan tidak sebatas mengupload foto dan video secara pribadi. Dari situ politisi perempuan petahana lebih mudah berinteraksi dengan warganya dan konstituen pun bisa melihat apa saja agenda yang sedang atau akan dilaksanakan oleh anggota dewan pilihan mereka. Selain gratis tidak perlu membayar tim pengelola media, adanya akun media sosial membuat politisi perempuan petahana juga bisa mengetahui peristiwa penting apa yang tengah terjadi di masyarakat dengan hanya melihat postingan mereka di media sosial.

4.2.2 Membranding Politisi Perempuan

Politik sekarang tumbuh dalam era *after image*; pencitraan tidak lagi sekadar basa-basi di atas iklan. Jika hanya berpura-pura menjadi inklusif, egaliter ataupun memasyarakat tapi hanya ditandakan dalam bentuk iklan, tidak akan ada perubahan

signifikan dari perilaku pemilih (Indrawan, 2018, p. 221). Membangun sebuah loyalitas pemilih tidak ketika musim kampanye dan dadakan, loyalitas pemilih akan terbentuk dengan sendirinya apabila politisi mengayomi, memperhatikan, mendengarkan dan selalu ada untuk konstituennya.

Dalam bidang ekonomi, konsumen akan selalu membeli produk dari sebuah perusahaan karena kualitas produk tersebut bagus. Bukan saja kualitas produknya, kualitas pelayanan pun juga akan diperhatikan konsumen. Seandainya pelayanannya buruk, pelanggan tidak segan mencari perusahaan lain yang menghasilkan produk yang sama dari perusahaan sebelumnya. Begitu pun di dunia politik, loyalitas konstituen dapil akan terjaga baik apabila politisinya memberikan kualitas pelayanan kelas wahid.

Perusahaan-perusahaan besar mempunyai kewajiban memberlakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada masyarakat bahkan pegawai perusahaan sekalipun. Politik juga begitu, ada istilah CSR politik. CSR Politik dikemas dalam program-program kerja di masyarakat untuk mengupayakan citra positif politisi perempuan petahana (Putra, 2015). CSR politik bentuk penguatan loyalitas pemilih selain itu upaya memberdayakan dan mentransformasikan segenap potensi masyarakat dalam kekuatan nyata.

4.2.3 Memanfaatkan Jejaring Keluarga

Mengawali dunia politik *background* keluarga politisi perempuan petahana di DPRD Provinsi Jawa Tengah ada yang basicnya politik semua. Contoh sang suami senior partai politik, sang ayah mantan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sang suami bupati di salah satu kabupaten Jawa Tengah. Untuk memenangkan dirinya kembali bertarung di lingkaran percaturan politik, politisi perempuan petahana berkompromi dengan relasi dari keluarganya. Kompromi tersebut tidak tendensius mengenai kepentingan perorangan tetapi lebih kepada tujuan banyak orang dirundungkan kemudian hasil musyawarah itu akan dipertimbangkan oleh politisi perempuan, bila simbiosisi mutualisme ke arah positif para politisi perempuan bersedia.

Contohnya ketika relasi sang suami ikut memberikan dukungan pada politisi perempuan dan berhasil menang di dapil tertentu maka politisi perempuan akan memprioritaskan dapil tersebut untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan perbaikan infrastruktur misalnya atau pemberian bantuan secara berkala sesuai kebutuhan masyarakat di dapil tersebut.

4.2.4 Menggandeng Politisi Kabupaten/Kota

Strategi politik politisi perempuan petahana di Jawa Tengah agar berhasil memenangkan dirinya kembali di pileg adalah dengan menggandeng politisi lain di tingkat kabupaten/kota yang memiliki nomor urut yang sama. Membangun kesepakatan bersama seperti ini akan memberikan keuntungan. Keuntungan pertama;

bisa sama-sama memenangkan pileg secara pribadi. Keuntungan kedua; bisa membanggakan partai politiknya bahwa kerjasama antara anggota partai politik di tingkat provinsi dan cabang bisa berlangsung dengan baik.

Memasang tandem politik tidak bisa terjadi sebelum adanya sebuah konsensus dan komunikasi baik diantara kedua belah pihak. Politisi perempuan petahan melihat melalui pemasangan tandem politik bersama politisi di tingkatan level kota maupun kabupaten bisa mempermudah mereka memperoleh dukungan dari masyarakat. Penambahan basis massa dari pendukung politisi level kota maupun kabupaten memberikan peluang meraih kemenangan kembali dalam setiap pilihan legislatif.

4.2.5 Silaturahmi Politik Pada Tokoh Daerah

Kontestasi politik tidak sebatas melibatkan politisi, partai politik dan kosntituen saja tetapi ada unsur “manusia” lainnya ikut menyemarakkan pemilihan umum, pilihan legislatif, pilihan gubernur hingga pilihan presiden yakni adanya para tokoh daerah yang disegani oleh masyarakat setempat. Kekuatan massa dari para tokoh daerah setempat tidak bisa dipandang sebelah mata. Terkadang masyarakat justru lebih mendengarkan petuah dari sang tokoh ketimbang perintah dari tim sukses calon legislatif (caleg).

Maka dirasa perlu membangun silaturahmi berbungkus komunikasi politik dalam rangka memenangkan suara masyarakat sesuai tempat tinggal para tokoh

tersebut. Jalinan komunikasi politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah awalnya sebatas meminta doa restu baru kemudian meminta dukungan dari para tokoh. Tokoh-tokoh daerah secara tidak langsung menjadi tim bayangan para politisi perempuan.

4.3.Pasca Terpilih Anggota Dewan

Di lingkaran politik, marwah politisi dan nama baik lembaga merupakan salah satu prioritas masyarakat dalam memberikan hak suaranya saat kontestasi politik. Perlu semacam social branding sebuah produk politik. Produk politiknya yakni ketokohan politisi dan reputasi partai politik. Mengingat kembali perihal tujuan komunikasi politik adalah menciptakan, membangun dan memperkuat citra (image) politik di tengah masyarakat khususnya pemilih (Putra, Komunikasi CSR Politik, 2015). Image politik sebagai suatu strategi positioning dapat menjadi salah satu sumber kemenangan partai politik dan anggotanya dalam persaingan dengan kandidat lain (Putra, Komunikasi CSR Politik, 2015). Maka dari itu para politisi perempuan petahana yang masih ingin melanjutkan estafet perjuangannya di kursi dewan harus bisa membaca dan merealisasikan strategi komunikasi politik tertentu salah satunya melalui opsi mempertahankan ketokohnya di mata publik.

4.3.1 Menjaga Elektabilitas

Menggaris bawahi mengenai menjaga elektabilitas dapat dilakukan dengan metode merawat ketokohan politisi ternyata bukan sebatas ketokohan dari internal saja

yang perlu dirawat dengan baik tetapi juga ketokohan yang melalui celah eksternal harus dijaga. Arifin (2011) menuliskan beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pemberi suara dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik yaitu kandidat yang sesuai citra jabatan ideal baginya. Maksud dari citra jabatan ideal politikus yang mengandung unsur kecakapan, kedewasaan, keberanian, rekam jejak politik yang baik dalam perjuangan politiknya terutama perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Politisi perempuan dituntut menjaga marwahnya dari berbagai pintu seperti marwah sebagai seorang pejabat publik, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Politisi perempuan “dipaksa” menjaga keseimbangan anatara perannya di depan publik dan perannya di ranah domestik. Faktor itulah yang harus dihadapi oleh politisi perempuan. Elizabeth (2018) konsep peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga, pemelihara generasi masa depan dan sebagai warga negara yang baik menjadi beban berat yang harus ditanggung politisi perempuan. Maka tidak mudah politisi perempuan menjaga dan merawat ketokohnya dimata konstituen, tidak hanya di daerah pemilihannya (dapil) saja tetapi seluruh cakupan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

4.3.1.1 Menjaga Nama Baik Pribadi Demi Memperkuat Elektabilitas

Tolok ukur tokoh publik memang tidak ada yang paten, namun masyarakat Indonesia meyakini bahwa seseorang ditokohkan oleh banyak orang karena jauh dari

perilaku-perilaku negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun masyarakat sekitarnya dan selalu menebarkan nilai-nilai positif pada banyak orang. Pun politisi perempuan. Politisi perempuan dalam menjaga reputasinya dimata konstituen harus pandai merawat “ketokohnya”. Cara merawatnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing politisi. Citra kandidat dari atribut politik dan gaya personal seorang kandidat politik seperti yang dipersepsi oleh pemberi suara membentuk citra para pemilih tentang orang yang berusaha menjadi pejabat (Rakhmat, 2006).

Seorang politisi harus memiliki sifat keramahtamahan, sopan, bersahabat, respek, mudah menyapa orang lain, tidak kikir dan fleksibel (Cangara, 2016). Selain itu politisi perempuan harus menjaga ketokohnya dengan tidak terlibat baik secara pasif maupun aktif dalam tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Politisi perempuan masih mudah terjerat kasus korupsi lantaran belum menguasai lika liku politik (Republika, 2012). Agar terhindar dari praktik KKN maka politisi perempuan wajib berhati-hati apabila melakukan kerjasama baik secara kelembagaan maupun atas nama pribadi.

Bila politisi perempuan terjerat kasus KKN walhasil akan susah mendulang kemenangan kembali dalam pileg selanjutnya. Stigma negatif politisi perempuan tersangkut kasus korupsi di masyarakat akan menghancurkan ketokohan sang politisi. Akan bermunculan uang korupsi digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti tas branded, sepatu branded, untuk perawatan tubuh dan lain sebagainya. Selain

korupsi politisi perempuan juga harus menghindari kasus lainnya, seperti jual beli barang haram dan isu memiliki Pria Idaman Lain (PIL).

Apabila sampai ada politisi perempuan kedapatan mempunyai PIL maka namanya akan hancur sebagai seorang tokoh publik, citra dirinya sebagai seorang ibu dan istri juga akan dipertanyakan oleh masyarakat. Hal itu akan melahirkan ketidakpercayaan publik sehingga publik tidak akan memilih kembali bila politisi perempuan tersebut mencalonkan diri kembali dikontestasi pileg.

“Beban” merawat ketokohan politisi perempuan di tengah patriarki memang tidak mudah dan perlu diberikan apresiasi penuh bagi politisi-politisi perempuan yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang tokoh publik dan tetap bisa menjaga citra positifnya sebagai seorang ibu dan istri. Merawat ketokohan politisi perempuan tidak dilakukan ketika musim kampanye saja. Justru merawat ketokohan dilakukan setiap waktu, dengan pandai dan sigap dalam merawat ketokohan maka konstituen tetap tidak akan berpaling kepada kandidat lain serta bisa menggaet para pemilih yang sebelumnya belum memilih politisi perempuan tersebut.

Ketika laki-laki sedang emosional cenderung menggunakan fisiknya seperti memukul, membanting, menendang dan berkata kasar sedangkan perempuan dalam menyikapi perasaan emosionalnya bertindak lebih hati-hati, lembut dan terkontrol (Suwandi, 2015). Dalam melaksanakan kompromi, seorang politikus tidak boleh berpikir hitam putih, matematis dan normatif saja. Selalu harus terbuka peluang untuk

membangun konsensus tertentu (Arifin, 2011). Dalam melakukan komunikasi politik, politisi perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah juga menerapkan penggunaan narasi dan bahasa yang mecairkan susasan ketimbang debat kusir berkepanjangan.

4.3.1.2 Menjaga Nama Baik Lingkaran Pribadi Politisi Perempuan

Politisi perempuan juga harus mampu menjaga nama baik “keluarga” besarnya. Hal ini agar tidak menimbulkan stigma negatif bahwa politisi perempuan tidak mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya maupun menjadi istri yang sempurna di mata suaminya. Politisi perempuan harus bisa memastikan bahwa keluarganya baik itu suami, anak ataupun kerabat terdekatnya tidak melakukan tindakan yang dapat ikut menyeret namanya menjadi negatif.

Peran domestik politisi perempuan tetap akan disorot oleh masyarakat. Berat perjuangan yang harus dilalui politisi perempuan, kualitas manajerial kepemimpinannya tidak hanya sebatas dilihat dari seberapa masifnya gerakan mereka menyuarakan kepentingan publik di pemerintahan namun juga seberapa pandai politisi perempuan merawat keluarganya. Keharmonisan keluarga juga menjadi salah satu faktor yang akan dilihat oleh konstituen. Apabila politisi perempuan tidak mampu mempertahankan keutuhan keluarganya maka labeling negatif tersemat cepat pada dirinya.

Politisi perempuan diwajibkan mampu menyeimbangkan tuntutan domestik dan non-domestik di mata masyarakat. Memerankan seorang ibu, politisi perempuan harus bisa menjaga anak-anaknya agar tidak lari dalam tindakan negatif yang melanggar norma agama maupun sosial seperti anak tidak terlibat dalam jual beli narkoba, kumpul kebo dan minum-minuman keras hingga prestasi akademik anak harus baik agar politisi perempuan dapat dibilang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Meskipun dalam mendidik anak adalah tugas serta tanggungjawab bersama antara suami dan istri.

Kemudian politisi perempuan juga harus pandai menjaga perselisihan keluarga, cekcok suami-istri jangan sampai ter-*blow up* oleh media. Menjalankan peran sebagai pejabat publik dan istri bukan perkara mudah, apalagi politisi perempuan disibukkan dengan kunjungan dapil dan harus menghadiri agenda-agenda di luar kota bahkan luar pulau selama beberapa hari kerja. Jika tidak terjalin komunikasi intens anatar politisi perempuan dan suaminya bisa membuat perselisihan.

Nama baik politisi perempuan juga dipertaruhkan dari segala perilaku lingkaran keluarganya. Jangan sampai isu keretakan keluarga karena alasan perceraian dimana sang suami merasa tidak diperhatikan oleh politisi perempuan muncul ke permukaan publik. Politisi perempuan memang dituntut menjaga dan merawat nama baik dirinya dari berbagai lini, tidak sebatas dirinya seorang pejabat publik.

Politisi perempuan akan mendapatkan keuntungan ketika berhasil merawat ketokohnya dari dua segi tersebut. Image positif akan terus melekat dan tentu saja menaikkan elektabilitas dirinya di mata konstituen. Tidak mudah memang bagi politisi perempuan merawat ketokohnya tapi tidak susah juga diaplikasikan karena perempuan dalam berpolitik selalu mengutamakan etika sehingga mampu merawat *personality branding*-nya dihadapan publik.

4.3.2 Tidak Berpindah Partai Politik

Power of feeling seseorang berikrar menjadi anggota dari suatu parta politik tertentu dilandasi oleh beberapa dorongan. Kesamaan ideologi, kesamaan visi misi, kesamaan tujuan ingin mengedepankan masyarakat merupakan poin-poin ketertarikan politisi perempuan berani teken kontrak menjadi anggota partai politik. Demi melaksanakan hak dan kewajiban politiknya, politisi perempuan mencoba “peruntungan” bertarung di gelanggang pemilihan legislatif (pileg).

Dari 15 politisi perempuan petahana DPRD Provinsi Jawa Tengah bentuk loyalitasnya sebagai anggota partai politik dibuktikan dengan tidak menjadi kutu loncat atau penjilat. Berpindah dari partai satu ke partai lain dapat mencoreng nama baik politisi perempuan. Bila sudah di-*labelling* kutu loncat dapat di-*blacklist* namanya dari peredaran politik. Tawaran bergabung partai politik lain silih berganti mendatangi para politisi perempuan petahan, ini sebuah godaan kecil secara tidak langsung namun

semua narasumber dalam penelitian ini memilih tidak hengkang dari partai politiknya karena alasan kesamaan ideologi, visi misi dan lain sebagainya.

Selain sebagai bentuk loyalitas politisi perempuan terhadap partainya, memantapkan kelembagaan juga tidak akan membuat basis massa di masyarakat berubah. Terkadang di masyarakat sendiri memilih pemimpin berdasarkan nama besar partai politiknya, sehingga bila politisi perempuan berpindah partai politik A ke partai politik B bisa membuat basis massa enggan memberikan suaranya kembali saat pileg periode berikutnya. Secara etika politik politisi pindah partai memang tidak masalah namun terkesan kurang baik atau plin-plan.

Politisi perempuan tidak hanya harus mempertahankan kelayalitan konstituennya tetapi juga partai politiknya. Menjadi petugas partai harus mau terlibat di setiap agenda partai meski tidak diberi bayaran. Sebenarnya bagi para politisi perempuan menjadi Dewan Pengurus Daerah (DPD) di partai politiknya masing-masing justru akan memberikan keuntungan secara tidak langsung.

Keuntungan pertama; mudah mendapatkan *acc* dari pimpinan partai di pusat apabila ingin mencalonkan diri kembali ketika pileg. Keuntungan kedua; dapat berkomunikasi lebih aktif dengan para Dewan Pengurus Cabang (DPC) di setiap kabupaten/kota sehingga ketika politisi perempuan ingin memenangkan pileg di periode selanjutnya bisa dibantu menambah pasukan pemilik suara untuk dimenangkan di wilayahnya. Keuntungan ketiga; bisa menjadi nilai plus tersendiri karena tidak

semua politisi perempuan diamanahi sebagai DPD partai politik dan poin ini bisa jadi pintu alternatif politisi perempuan menggali ilmu lebih mendalam mengenai peta perpolitikan Jawa Tengah dari politisi laki-laki baik dari satu partai maupun beda partai. Keuntungan keempat; politisi perempuan bisa memperoleh nomor urut satu apabila kinerjanya saat dapat amanah menjadi DPD partai politik bagus. Nomor urut satu memang tidak sepenuhnya menentukan namun dapat membantu konstituen lebih mudah dalam melakukan pencoblosan ketika pemilihan.

Nama besar partai memperhitungkan penyusunan keputusan seseorang untuk memilih (Rakhmat, 2006), politisi perempuan memanfaatkan peluang tersebut. Organisasi yang berafiliasi dengan partai politiknya juga diperhatikan oleh para politisi perempuan karena itu peluang meraup suara dan mempertahankan suara agar politisi perempuan tidak tersingkirkan dari parlemen. Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik tidak sebatas pajangan semata, politisi perempuan justru memanfaatkan KTA-nya untuk memberikan kontribusi positif atas nama partai dengan melakukan kerja-kerja politik sehingga branding partai semakin positif di mata masyarakat.

4.3.3 Tetap Bergerak Pada Organisasi Non Politik

Politisi perempuan berhasil mengulang kemenangannya lebih dari satu kali berturut-turut di parlemen tidak pernah melupakan bahkan meninggalkan organisasi non-politik yang pernah menghantarkan mereka sebelum memasuki gerbang politik.

Berbagai organisasi non-politik tetap dipegang oleh politisi perempuan meski tidak sepenuhnya *full*.

Anggota dari organisasi non-politik para politisi perempuan petahana di DPRD Provinsi Jawa Tengah tetap dijadikan basis massa. Sebagai bukti politisi perempuan tetap mantap tidak meninggalkan organisasi itu dengan mengadakan kerjasama simbiosis mutualisme. Ketika organisasi non-politik mengadakan acara, politisi perempuan menghadiri acaranya sebagai pembicara atau sekadar memberikan sambutan pembuka, selain itu petahana perempuan juga ikut mensupport kegiatan dalam bentuk lain, memesankan snack atau makan siang.

Hal-hal kecil itu memberikan pengaruh pada politisi perempuan petahana dimana anggota organisasi non-politik dengan senang hati akan memberikan suaranya ketika ada pemilihan lagi dan anggota-anggota barunya juga akan mulai mengenal politisi perempuan tersebut sehingga bisa menambah jumlah suara pemilih ketika musim pileg. Selain itu biasanya politisi perempuan petahana diberikan amanah sebagai penasehat organisasi non-politik, amanah itu dimanfaatkan positif oleh politisi petahana untuk ikut mensukseskan program kerja pemerintah.

Simbiosis mutualisme inilah yang membangun loyalitas pemilih pada para politisi petahana, sama-sama saling merawat dan menjaga tanpa merugikan keduanya. Cangara (2016) seorang politisi perlu menjalin hubungan silaturahmi bersama banyak orang dan menghindari konflik yang bersifat psikologis dengan konstituennya apalagi

dalam bentuk fisik karena politisi tidak akan pernah terpilih tanpa dukungan orang lain. Memantapkan kelembagaan dan tidak meninggalkan lembaga organisasi non-partai adalah salah satu metode memperkuat silaturahmi diantara politisi dan konstituennya.

Tidak etis meninggalkan organisasi tempat dimana politisi perempuan bergerak untuk pertama kali ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan. Dengan meninggalkan organisasi non-politik maka secara tidak langsung politisi perempuan memutuskan hubungan silaturahmi dengan banyak orang dan akan menyempitkan hidup dari politisi perempuan itu sendiri. Seandainya politisi perempuan sudah tidak memantapkan organisasi non-politik maka kerugiannya adalah kehilangan pendukung-pendukungnya sebab penilaian negatif yang muncul pada seseorang akan berakibat penyebaran informasi berantai dari orang satu ke orang lainnya yang ujung-ujungnya malah menghilangkan dukungan kepada diri politisi perempuan itu sendiri (Cangara, 2016).

Justru memantapkan kelembagaan organisasi non politik salah satu faktor keberuntungan bagi para politisi petahana DPRD Provinsi Jawa Tengah. Partai politik bisa memberikan rekomendasi politisi maju atau tidak bila basis massa dari politisi tersebut juga banyak. Untuk masuk parlemen memang partai politik acuan kendaraanya, tetapi organisas-organisasi non politik sumber utama pemberi suara ketika politisi membutuhkan suaranya agar bisa dengan mudah menang dalam kontetstasi pileg di setiap periodenya. Maka dari itu dari lima belas politisi petahana di

Jawa Tengah yang sukses mendulang kemenangannya kembali pandai merawat dan memantapkan kelembagaan organisasi non politiknya serta tidak meninggalkan organisasi itu.

4.3.4 Merawat Amanah Konstituen

Amanah wakil rakyat tentu saja berbatas waktu, anggota dewan lima tahun sekali harus dipilih kembali. Pergantian periode bisa menghantarkan politisi baru masuk di kursi dewan, pun sebaliknya pergantian periode bisa membuat anggota lama bertahan. Anggota-anggota dewan perempuan petahana di Provinsi Jawa Tengah menerapkan sistem bersedia membuka diri. Ketika politisi perempuan sudah mampu menjaga konstituennya dan memperkuat loyalitas konstituen, mereka tidak kemudian hanya santai-santai saja.

4.3.4.1 Rajin Melakukan Kunjungan Dapil

Wakil rakyat yang baik bertugas bukan di dalam gedung saja, justru anggota dewan harus sering melakukan kunjungan di daerah pemilihannya tanpa harus menunggu jadwal reses semata. Masyarakat menilai bahwa politisi akan lebih mudah diterima oleh konstituennya apabila rajin mengunjungi warga, mengikuti kegiatan warga, ikut gotong royong ketika warga ada hajatan, menghadiri undangan warga bukan muncul hanya ketika tugas reses saja.

Politisi perempuan petahana DPRD Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan sedikit waktu luangnya mengikuti kegiatan di masyarakat seperti PKK hingga pengajian warga. Poin positifnya, masyarakat lebih mengenal dan dekat dengan wakil rakyatnya pun sebaliknya politisi perempuan tahu informasi di masyarakat secara lebih mendalam serta lebih dikenal oleh warga lainnya.

4.3.4.2 Merealisasikan Permintaan Masyarakat

Selama masa kampanye, konstituen akan menandai caleg pilihannya dalam menyuarakan janji-janji kampanye sebelum terpilih. Tugas anggota dewan setelah memenangkan kontestasi pemilihan adalah merealisasikan semua janji kampanyenya secara bertahap dan konsisten. Amanah anggota dewan merupakan harapan banyak konstituen demi membantu kemaslahatan masyarakat. Politisi perempuan petahana DPRD Provinsi Jawa Tengah di periode pertama dan berikutnya selalu mengusahakan merealisasikan permintaan konstituen di dapilnya, sehingga warga percaya pada mereka bahwa wakil rakyat yang mereka pilih bukan sebatas meminta suaranya saja saat kampanye.

4.3.5 Membuka Jejaring Baru

Basis massa dirasa sudah aman, politisi perempuan petahana membuka jejaring baru. Jejaring baru didapatkan dari interkasi komunikasi dengan masyarakat di dapilnya yang memang belum disentuhnya selama ini karena berbagai faktor. Politisi

perempuan petahana merambah jejaring baru tidak sebatas ingin memperoleh suara saja. Menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, politisi perempuan petahana tidak ingin di dapilnya ada warga yang belum tersentuh.

Membuka jejaring pun tidak langsung sekali berhasil dilakukan oleh politisi perempuan petahana, maka mereka mempunyai metode tersendiri yang bisa juga diterapkan oleh politisi lainnya apabila ingin memenangkan kontestasi pileg di periode berikutnya. Arifin (2011) menerangkan bahwa faktor yang mendorong lahirnya kesediaan membuka diri ada beberapa. Pertama; adanya kesamaan karakteristik personal. Contoh sesama perempuan pasti punya kesamaan dimana peran mereka sebagai istri dan ibu. Kedua; daya tarik fisik, kedekatan, familiarity. Politisi perempuan tentu akan mudah menggaat konstituen perempuan karena mereka mempunyai kesamaan satu sama lain. Ketiga; kemampuan. Politisi perempuan petahana tidak diragukan lagi kemampuannya dalam menuntaskan amanah. Kemampuan dibuktikan oleh politisi perempuan dengan bisa menggarap dapilnya agar kualitas SDM mauoun infratstruktur di dapilnya mengalami peningkatan fluktiatif.

Orang-orang yang memiliki persamaan karakteristik personal, seperti kesamaan nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosio-ekonomi, agama, ideologi atau partai politik cenderung saling menyukai (Arifin, 2011). Politisi perempuan melakukak pendekatan-pendekatan dan mereka tidak menutup diri. Bagi mereka tidak maslaah

ketika dulu masyarakat di sebuah wilayah meski masuk dapilnya tapi belum memilih dirinya.

Melalui pendekatan secara continue dan membuka diri tanpa ada “tendensi” tertentu justru akan menambah poin plus tersendiri bagi politisi petahana. Politisi perempuan petahana menerapkan trik ini secara konsisten dan berkelanjutan tidak hanya formalitas sekali saja.

Meski politisi perempuan petahana di DPRD Jawa Tengah sudah mempunyai basis massa disetiap dapilnya karena organisasi non politik yang mengantarkan mereka menuju parlemen, namun mereka tidak menutup diri bergabung dengan organisasi atau komunitas yang memang sudah ada di masyarakat. Misalnya komunitas sampah organik, komunitas pecinta olahraga tenis hingga organisasi yang cocok dengan komisinya agar bisa merealisasikan program kerja untuk kebermanfaatn bersama. Mungkin bagi sebagian bergabung dengan organisasi-organisasi itu kurang bermanfaat atau malah membuang waktu apalagi pekerjaan anggota dewan sudah seabrek, tetapi politisi perempuan petahana melihat ada peluang tersendiri.

Untuk memenangkan kontestasi di lingkaran politik lebih dari satu kali membentuk dan memantapkan kelayan konstituen dengan “memanjakan” pendukung memang penting, tapi memperbanyak suara dari berbagai pintu juga tidak kalah penting. Lewat organisasi atau komunitas dalam masyarakat, politisi perempuan petahana bisa memperoleh suara lebih banyak. Masyarakat yang sebelumnya tidak

mengenal politisi perempuan akhirnya menjadi kenal dan bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui komunitas yang diikuti oleh politisi perempuan tersebut.

Politisi perempuan petahana di DPRD Jawa Tengah tidak merasa terbebani melibatkan dirinya menjadi anggota baru di komunitas, meski tidak selalu dijadikan pengurus dengan menjadi anggota baru di organisasi dan komunitas yang sudah atau bahkan sedang berkembang di masyarakat memberikan pemikiran-pemikiran baru serta bisa menyerap aspirasi mereka. Apa yang dibutuhkan dan diperlukan organisasi dan komunitasnya bisa dibantu dengan mengajukan proposal, selain membantu lewat kelembagaan politisi perempuan juga membantu pendanaan secara pribadi. Sehingga suara politisi perempuan petahana di Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan.

No	Strategi Komunikasi Politik	Poin Penjabaran	Temuan Penelitian	Keterangan
1	Pra Terpilih Anggota Dewan	Memilah dan Memilih Partai Politik	Politisi perempuan dipinang oleh partai politik atau diajukan oleh partai politik	Penentuan keputusan dan pengambilan sikap politisi perempuan terhadap partai politik dilatar belakangi kesamaan ideologi, kecocokan visi misi, sejarah partai dan “trah” politik keluarga besar.
		Penyusunan Peta Politik	<i>Main Target</i>	Menentukan siapa saja target sasaran selama masa kampanye, mulai dari jenis kelamin hingga status sosial.
			<i>Clustering Target</i>	Wilayah mana saja yang menurut politisi petahana penting didatangi sekaligus bisa langsung mendatangkan masyarakat dari daerah terdekatnya.
			<i>Hot Buton</i>	Meneliti latar belakang tiap daerah pemilihannya serta karakteristik daerahnya.
			<i>Program</i>	Membuat konsep program yang cocok untuk kampanye di daerah tersebut.
			<i>State of Mind</i>	Merealisasikan acara-acara menarik selama masa kampanye berdasarkan <i>main target</i> hingga <i>hot button</i> .
2	Masa Kampanye	Menentukan Alat Kampanye	Penggunaan media cetak	Media cetak digunakan oleh politisi perempuan pada dapil tertentu serta disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, karena tidak semua masyarakat di dapil setiap politisi perempuan petahana mampu

				membaca atau menjangkau media cetak. Narasumber penelitian ini juga tidak terlalu melibatkan media cetak besar sekelas media cetak nasional, namun lebih kepada koran-koran daerah.
			Penggunaan Media Online	Untuk media online, politisi perempuan melibatkan portal online kedaerahan maupun portal online milik DPRD. Politisi perempuan memanfaatkan media online hanya diterapkan saat politisi perempuan reses atau melakukan kunjungan ke dapilnya. Sehingga penggunaan media oleh politisi perempuan petahana di Jawa Tengah tidak begitu kentara.
			Pemanfaatan media sosial pribadi sebagai bentuk komunikasi politik	Politisi perempuan petahana aktif di media sosial <i>Facebook</i> . Mereka aktif berbagi foto kegiatan dan berinteraksi dengan konstituen melalui komentar-komentar di <i>facebook</i> pribadi masing-masing. Ada beberapa narasumber yang mempunyai akun pribadi <i>instagram</i> tetapi mereka lebih aktif di media sosial <i>facebook</i> .
		Mem- <i>branding</i> Politisi Perempuan	Membentuk dan mengemas <i>personality branding</i> politisi perempuan yang ditampilkan pada publik	Citra politisi perempuan petahana bukanlah perilaku yang sengaja dibuat-buat agar konstituen tertarik pada mereka. Justru politisi perempuan petahana menampilkan dirinya yang apa adanya tanpa harus memanipulasi sifat dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

		Memanfaatkan Jejaring Keluarga	Berkompromi dengan relasi politik yang dimiliki keluarga	Politisi perempuan memanfaatkan jaringan dari suami ataupun ayahnya yang sudah berkecimpung lama dalam lingkaran politik lebih dulu ketimbang dirinya untuk meraih banyak suara konstituen setiap pemilihan. Jejaring suami maupun sang ayah dapat membantu politisi perempuan untuk meraih suara konstituen di dapil masing-masing politisi.
		Menggandeng Politisi Kabupaten/Kota	Bekerjasama dengan calon legislatif di tingkat daerah dalam suksesi pemenangan pileg	Tandem politik juga diterapkan oleh politisi perempuan petahana dengan berkolaborasi bersama calon legislatif (caleg) di kabupaten/kota dengan memasang banner bersama, kampanye bersama, mengadakan kegiatan rutin bersama sebagai ajang memperoleh kepercayaan di masyarakat dapilnya.
		Silaturahmi Pada Tokoh Daerah	Melakukan komunikasi politik kepada para tokoh yang disegani masyarakat di dapilnya	Politisi perempuan petahana anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan komunikasi politik berbalut silaturahmi kepada para tokoh-tokoh daerah yang disegani oleh konstituennya. Selain meminta doa restu juga memohon dukungan penggalangan massa.
3	Pasca Terpilih Anggota Dewan	Menjaga Elektabilitas	Menjaga Nama Baik Pribadi	Politisi perempuan menjauhi serta tidak melakukan tindak pidana korupsi maupun tindakan amoral lainnya yang bisa menghancurkan karier politiknya. Hal tersebut selain memang perbuatan yang terlarang juga untuk melindungi dan menjaga “marwah” politisi perempuan. Elektabilitas politisi perempuan di mata masyarakat akan tetap positif dan mempermudah politisi perempuan mendulang kembali pada pesta pilihan legislatif (pileg) periode berikutnya.

		Menjaga Nama Baik Lingkaran Pribadi	Lingkaran keluarga politisi perempuan juga diperhatikan serius oleh para narasumber penelitian dengan kata lain suami, anak maupun orang tua dari politisi perempuan tidak melanggar undang-undang ataupun melakukan perbuatan negatif yang akan mencoreng nama besar politisi perempuan tersebut. Apabila ada sanak famili terjerat kasus tertentu, dapat mencoreng nama politisi perempuan di masyarakat.
	Membuka Jejaring Baru	Bergabung dengan organisasi/komunitas masyarakat	Dalam masyarakat ada komunitas yang mungkin kurang dianggap penting seperti komunitas senam, komunitas bank sampah tetapi politis perempuan petahana menjadi dewan penasehit dan tentu saja ini menguntungkan bagi politisi perempuan karena membuat dirinya lebih dikenal masyarakat dan bisa menambah suara saat pileg.
	Tidak Berpindah Partai Politik	Menjadi Pengurus DPD Partai Politik	Ketika politis perempuan berpindah partai politik maka akan muncul labelling “kutu loncat”, maka dari itu politisi perempuan lebih memilih setia pada partai politik pengusungnya. Selain itu politisi perempuan sukarela menjadi pengurus harian Dewan Pengurus Partai (DPD) karena dengan menjadi DPD ada beberapa keuntungan jangka panjang yang akan diperoleh oleh politisi perempuan, salah satunya bisa mendapatkan nomor urut pertama dikala pileg berlangsung.
	Tetap Bergerak Pada Organisasi Non Politik	Setia Pada Organisasi Pengusung Non Politik	Politisi perempuan petahana tetap aktif membantu kegiatan organisasi keperempuan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keprofesian yang turut andil mengusng dan menghantarkan mereka di kursi anggota dewan.
		Rajin Menemui Konstituen	Para politisi perempuan petahana menyapa dan bertemu konstituen tidak hanya masa reses atau kunjungan dapil semata. Tetapi bila mereka tidak ada rapat penting, mereka akan turun ke dapil mereka mengiukti

		Merawat Amanah Konstituen		acara warga atau membantu acara warga sekaligus mendengarkan permintaan serta keluhan kesah konstituen.
			Menepati Janji Kampanye	Merealisasikan janji kampanye melalui program kerja yang dilaksanakan oleh para politisi perempuan.